

PERSEPSI TERHADAP STANDAR, PEDOMAN DAN MANUAL (SPM) DALAM PENERAPAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG

Perception of Standards, and Guidelines Manual (SPM) in Application of Certification Worthy Function Building

Yulinda Rosa

Pusat Litbang Permukiman Badan Litbang PU
Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung
E-mail : yulindar@yahoo.co.id

Diterima: 12 April 2013, Direvisi: 12 Juli 2013, Disetujui: 17 Juli 2013

Abstrak

Peran standar, pedoman dan manual (SPM) dalam penerapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sangat diperlukan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002, dan lebih di detailkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 28 tahun 2002, serta Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Persepsi terhadap SPM dalam penerapan regulasi SLF merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam penerapan regulasi tersebut. Untuk memfokuskan pengukuran kearah persepsi terhadap SPM dalam penerapan SLF, terhadap *stakeholders* dilakukan pengkondisian untuk menghomogenkan karakteristik sampel dengan terlebih dahulu diberikan sosialisasi SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung, sebagai studi kasus dalam pengamatan ini, sosialisasi yang dilakukan di dua provinsi (Sumatera Barat dan DIY). Pengamatan dilakukan melalui pengukuran dua variabel yaitu: 1) Variabel Keberterimaan *stakeholders* terhadap pemberian materi dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi ; 2) Variabel persepsi *stakeholders* terhadap SPM tersebut. Metode sampling pertimbangan dilakukan untuk memilih *stakeholders* yang dijadikan objek kajian, data diolah dengan menggunakan program excel dan SPSS (*Statistical Package for the Social Science*), dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Persepsi *stakeholders* terhadap SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung sudah baik. Tapi dalam penerapannya masih ada beberapa kendala diantaranya: Ketersediaan tenaga ahli, belum tersedianya pedoman pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung, ketersediaan laboratorium uji kelayakan bangunan, ketersediaan tukang yang profesional, masih adanya beberapa komponen yang belum terakomodir dalam SPM, dan masih banyaknya bangunan gedung yang sudah berdiri belum mempunyai IMB.

Kata Kunci: Persepsi, SPM, SLF bangunan gedung, diseminasi dan Sosialisasi.

Abstract

The role of Standards, Guidelines and Manuals (SPM) in the application of Function Worthy Certificate (SLF) of Building is necessary in accordance with the mandate of the Building Act Number 28 of 2002, and more detail in the Indonesian Government Regulation Number 36 of 2005 of the Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002, as well as the Minister of Public Works Regulation Number 25 of 2007 on Guidelines of Building Functions Worthy Certificate. Perceptions of SPM in the application of SLF regulation is one of the success factors in the implementation of these regulations. To focus in measurement towards the application of SPM in SLF perception and the stakeholders do a conditioning to homogenize of sample characteristics with given in advance of SPM Socialization in SLF application as a case study on this observation. The socialization conducted in two provinces, which are West Sumatera and Yogyakarta. Observations were made by measuring two variables: 1) Variable of stakeholder's acceptability of Dissemination and Socialization activities; 2) Variable of stakeholder's perception of the SPM. Judgment Sampling Method was to select stakeholders as object of observation. The data were processed using Microsoft Excel and SPSS (Statistical Package for the Social Science) and analyzed using descriptive methods. Perception of stakeholders toward SPM in SLF application for building is good. But in practice, there are still some problems such as: availability of experts, unavailability of Building Function Feasible Inspection Guidelines, availability of test laboratory of building feasibility, availability of professional craftsman, some components that have not been accommodated in the SPM, and some buildings that still have not had IMB.

Keywords: Perception, SPM, SLF building, dissemination and socialization

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Standar Nasional Indonesia dalam menjaga kualitas Bangunan Gedung merupakan salah satu faktor yang sangat penting, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung 28 tahun 2002, lebih di detailkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang nomor 28 tahun 2002, tentang bangunan gedung bahwa. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknik sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: status hak atas tanah, dan atau/izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; status kepemilikan bangunan gedung; dan izin mendirikan bangunan gedung. Persyaratan teknik bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Pengaturan persyaratan bangunan gedung diatur dalam peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman dan standar teknik.

Pedoman teknik adalah acuan teknik, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah, dalam bentuk ketentuan teknik penyelenggaraan bangunan gedung. Standar teknik adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Berdasarkan data permintaan advis teknik yang diajukan ke Pusat Litbang Permukiman pada tahun 2012 yang berjumlah 43 permintaan, hampir 90% dari permintaan advis teknik merupakan permintaan bantuan penilaian tingkat keandalan bangunan gedung. Alasan pemohon mengajukan permintaan, berbagai macam tujuan diantaranya:1) akan melakukan perbaikan terhadap bangunan gedung yang ada, karena secara visual terlihat adanya beberapa kerusakan; 2) akan melakukan pengembangan dengan penam-bahan lantai dan lain sebagainya: atau 3) untuk tujuan kedua-duanya, yaitu perbaikan dan sekaligus pengembangan. Advis teknik adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberikan informasi dan rekomendasi teknik untuk mengatasi permasalahan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Penyelenggaraan bangunan gedung, telah diatur dalam Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi

Bangunan Gedung, di dalamnya mengatur perlunya dipenuhi persyaratan dari segi administratif dan teknik oleh suatu bangunan gedung. Sedangkan standar, pedoman dan manual (SPM) yang mengatur persyaratan teknik (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) yang harus dipenuhi dalam suatu bangunan gedung telah banyak disusun khususnya oleh Pusat Litbang Permukiman (PUSKIM). Beberapa standar berkaitan dengan bangunan gedung: SNI 03-1727-1989 Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung; SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung; SNI Tata Kayu untuk Bangunan Gedung; SNI 03-6816-2002 Tata Cara Pendetilan Penulangan Beton; SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Bertulang untuk Bangunan Gedung dan masih banyak lagi SPM bangunan gedung yang telah disusun.

Berdasarkan uraian di atas, bila kedua regulasi telah di jalankan secara penuh, semestinya semua bangunan gedung yang telah berdiri dan dimanfaatkan penghuni sudah memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung. Tapi, berlawanan dengan realisasi di lapangan serta permintaan advis teknis ke Pusat Litbang permukiman, masih banyak kasus-kasus bangunan gedung yang telah dimanfaatkan, dibawa ke ranah hukum karena diperkirakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah di atur dalam standar, pedoman dan manual yang telah disusun. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggara bangunan gedung, SPM belum secara optimal dijadikan sebagai acuan. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan informasi apa yang menyebabkan keadaan tersebut?

Pusat Litbang Permukiman (PUSKIM) sebagai salah satu instansi litbang di Kementerian Pekerjaan Umum bertugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan evaluasi SPM di bidang perumahan dan permukiman (salah satunya mengenai bangunan gedung) serta pemasyarakatan hasil, melakukan peng-kajian berkaitan dengan persepsi stakeholders terhadap SPM dalam penerapan regulasi SLF.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi *stakeholders* terhadap SPM dalam penerapan SLF dan mengetahui keberterimaan *stakeholders* terhadap SPM SLF Bangunan Gedung.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Materi secara umum yang disampaikan dalam acara sosialisasi, diuraikan di bawah ini.

2.1 Materi Sosialisasi Keselamatan Bangunan dari Segi Struktur

Secara garis besar materi sosialisasi keselamatan bangunan dari segi struktur adalah: a. Konsep keandalan bangunan dari 4 aspek (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan); b. Alasan dan manfaat perlukannya asesmen keandalan bangunan gedung; c. Karakteristik kinerja masa layan struktur; d. Faktor berpengaruh terhadap keandalan struktur bangunan gedung; e. Gambaran umum realisasi pemeriksaan keselamatann bangunan dari segi struktur.

Untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal, harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Sebelum bangunan gedung dimanfaatkan, terlebih dahulu harus diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung. Pihak yang berwenang menetapkan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung adalah pemerintah daerah. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. Keselamatan bangunan merupakan suatu kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh kinerja bangunan gedung. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung (Permen PU nomor 25, 2007).

Kemampuan mendukung beban muatan adalah kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan sampai kondisi pembebanan maksimum, beban muatan mati, hidup dan akibat perilaku alam (UU nomor 28, 2002). Beberapa alasan dilakukannya asesmen keandalan bangunan gedung: a. Faktor umur pakai bangunan (misal,

korosi, fatig, dan lain lain); b. Kerusakan struktur bangunan akibat kecelakaan (misal, kebakaran, tabrakan, dan lain lain); c. Perubahan beban kerja (misal. fungsi ruang, dan lain lain); d. Penambahan beban kerja (misal. Pemasangan tower pemancar pd struktur atap); e. Mengalami bencana alam (misal. gempa, angin, dan lain lain). Pemeliharaan struktur bangunan gedung yang dilakukan melalui pekerjaan perbaikan dan pencegahan akan memperpanjang usia layan struktur beton.

Asesmen bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan kondisi eksisting gedung, mampu memikul beban saat ini dan ke depan sesuai dengan fungsi gedung dalam kurun waktu yang direncanakan. Manfaat pemeriksaan struktur untuk mencegah kegagalan struktur atau bagian dari struktur serta meminimalisasi biaya pemeliharaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keandalan struktur bangunan gedung adalah keterampilan pelaksana, pemahaman bahan bangunan dan rekayasa struktur konstruksi.

2.2 Materi sosialisasi Gambaran Untuk Pelaksanaan SLF dan Pedoman Pelaksanaan SLF.

Penerapan SLF diatur dalam Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Salah satu indikator untuk menilai keandalan bangunan gedung dilakukan melalui penilaian SLF. Pemerintah daerah/Lembaga Inspeksi menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi, tanpa dipungut biaya. Adanya hasil pemeriksaan/audit kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun, bangunan gedung yang telah didirikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, wajib memiliki sertifikat laik fungsi. Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi (UU Nomor 28, 2002). SLF dilakukan setelah selesai pelaksanaan konstruksi, untuk rumah tinggal sederhana tidak perlu persyaratan penerbitan SLF.

Masa berlaku SLF untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF). Masa berlaku SLF bangunan gedung untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20 (dua puluh)

tahun. Sedangkan untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung, dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis, serta hasil pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan/perawatan pada tahun-tahun sebelumnya telah memenuhi persyaratan. Terhadap bangunan gedung yang dilakukan perubahan fungsi, diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung, setelah diterbitkannya IMB yang baru atas perubahan fungsi bangunan gedung tersebut.

Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun. Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan setelah pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan administratif, dan persyaratan teknis telah memenuhi persyaratan. Untuk bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh pengembang (*developer*), seperti pembangunan perumahan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, dapat diminta secara bertahap oleh pengembang. Untuk bangunan gedung dengan sistem *strata title*, penerbitan SLF diberikan untuk satu kesatuan sistem bangunan gedung.

2.3 Materi Sosialisasi Teknik Penilaian Dengan Sistem Skoring

Tujuan penilaian keandalan bangunan gedung dalam rangka penerbitan SLF adalah menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan memberikan kemudahan bagi penghuni/pengguna bangunan gedung, dilakukan melalui ijin mendirikan bangunan, sertifikat laik fungsi dan rencana teknis pembongkaran. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. Salah satu kendala implementasi SLF adalah tidak adanya pedoman pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Prinsip, lingkup dan batasan penilaian keandalan bangunan gedung: a. Terukur, tepercaya dan terlaksana; b. Lingkup: persyaratan keandalan; c. Tidak overlap, evaluasi kondisi eksisting, bukan evaluasi desain, bukan jaminan. Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi, apabila telah

memenuhi persyaratan teknis. Penilaian dengan sistem skoring hanya alat bantu (digunakan untuk penilaian aspek kesehatan, kenyamanan dan kemudahan), yang utama adalah hasil pemeriksaan atau pengujian, dilakukan untuk memudahkan atau melihat dengan cepat kondisi keandalan bangunan gedung. Penilaian dilakukan melalui teknik konversi data/fakta skor, dengan membandingkan data/fakta dengan referensi sehingga menggambarkan tingkat keandalan, hasil penilaian mengeluarkan rekomendasi kelaikan fungsi dengan kategori: a. Laik; b. Laik bersyarat dan c. Tidak laik. Untuk penilaian aspek keselamatan tidak dilakukan dengan sistem skoring, melainkan dengan pengamatan visual dan pengujian.

2.4 Persepsi

Persepsi adalah sensasi dan interpretasi (Sukanto:1986). Menurut Dafa (2003) dikutip oleh Kristanto (2006), "persepsi" adalah proses kognitif yang digunakan orang untuk merasakan kondisi lingkungan dengan memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Pengorganisasian informasi yang baik didapatkan melalui proses yang tepat ditunjang dengan teknik yang tepat dilengktapi dengan adanya unsur-unsur komunikasi sebagai sarana penunjang.

3. METODE PENELITIAN

Pengukuran variabel persepsi dilakukan pada kondisi *stakeholders* sudah mendapatkan informasi mengenai regulasi dan SPM berkaitan dengan SLF. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan pengukuran hanya terhadap persepsi penerapan SPM dalam penerapan regulasi SLF, tidak tercampur oleh pengaruh faktor lain seperti belum sampainya informasi berkaitan dengan regulasi SLF, belum sampainya informasi telah tersedianya SPM berkaitan SLF bangunan gedung, serta belum sampainya informasi substansi SPM berkaitan dengan SLF bangunan gedung. Untuk itu pemilihan sampel responden dibatasi untuk responden yang pernah menerima sosialisasi SPM bangunan gedung yang dilakukan oleh Pusat Litbang Permukiman, pada tahun 2012. Hal tersebut dilakukan untuk menghomogenkan kondisi sampel yang dipilih.

Sampel provinsi dalam tulisan ini merupakan studi kasus *stakeholders* penyelenggara bangunan gedung yang pernah mendapatkan kegiatan sosialisasi SPM SLF Bangunan Gedung yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 (peserta sosialisasi: Pemerintah Daerah tingkat propinsi/Kota/

Kabupaten, Asosiasi, kontraktor, konsultan, LSM dan Perguruan Tinggi) yaitu di Provinsi Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden dari setiap provinsi diambil secara sampel dengan menggunakan metode sampling pertimbangan. Dasar pertimbangan mewakili *stakeholders* yang terkait dengan SLF Bangunan Gedung, dan sebagai peserta sosialisasi SPM SLF Bangunan Gedung yang dilaksanakan di lokasi terpilih. Jumlah sampel di provinsi Sumbar 60 orang, dan provinsi DIY berjumlah 51 orang (merupakan *stakeholders* dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi/Kota/ Kabupaten, Asosiasi, kontraktor, konsultan, LSM dan Perguruan Tinggi). Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis deskriptif untuk mengetahui keberterimaan dan persepsi *stakeholders* terhadap materi SPM yang diberikan. Data diolah dengan menggunakan program excel dan SPSS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengkajian ini digunakan dua jenis alat ukur, untuk mengukur variabel persepsi responden SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung dan keberterimaan *stakeholders* terhadap materi SPM dalam penerapan SLF pada kegiatan sosialisasi dan yaitu:

- 1) Aspek persepsi untuk mengukur interpretasi dan pemahaman peserta terkait penerapan SPM khususnya SPM SLF Bangunan Gedung yang diukur melalui 4 variabel. Variabel pertama, pengenalan terhadap keberadaan SPM SLF Bangunan Gedung, untuk dapat menerapkan SPM SLF Bangunan Gedung terlebih dahulu perlu disampaikan keberadaan dari SPM tersebut; Variabel kedua, akses untuk mendapatkan SPM SLF Bangunan Gedung, untuk mengetahui lebih detail isi dari SPM tersebut perlu adanya sumber penyedia SPM tersebut, diukur melalui ketersediaan akses untuk memperoleh SPM tersebut; Variabel ketiga, keterkaitan penggunaan SPM SLF Bangunan Gedung dengan pekerjaan yang dihadapi sehari-hari, perlu diterapkan pemahaman bahwa *stakeholders* yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung perlu menerapkan SPM SLF Bangunan Gedung untuk melindungi pengguna dari segala bahaya yang mungkin terjadi pada bangunan gedung tersebut; Variabel keempat, implementasi SPM SLF Bangunan Gedung di tempat bekerja. Pada *stakeholders* perlu diberikan pemahaman bahwa SPM SLF Bangunan Gedung dapat

diterapkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan dapat dijadikan rujukan. Alat ukur aspek persepsi secara rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

- a. Pengenalan terhadap SPM. Diukur melalui item pertanyaan:
 - Mengetahui SPM Bidang Permukiman;
 - Mengetahui SPM SLF Bangunan Gedung (terdiri dari 4 materi)
 - b. Akses untuk mendapatkan SPM SLF Bangunan Gedung. Diukur melalui item pertanyaan:
 - Ketersediaan informasi mengenai SPM;
 - Kemudahan mendapatkan akses untuk memperoleh SPM.
 - c. Keterkaitan penggunaan SPM SLF Bangunan Gedung dengan pekerjaan yang dihadapi sehari-hari. Diukur melalui item pertanyaan:

Materi SLF Bangunan Gedung berkaitan dengan tugas pekerjaan di institusi.
 - d. Implementasi/penerapan SPM SLF Bangunan Gedung di tempat bekerja. Diukur melalui item pertanyaan:
 - Menggunakan SN sebagai rujukan;
 - SPM SLF Bangunan Gedung dapat diterapkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah tempat bekerja;
 - Adanya kendala dalam penerapan SPM SLF Bangunan Gedung di daerah tempat bekerja;
 - Masih ada aspek tertentu dari pekerjaan anda yang tidak terakomodasi dalam lingkup SPM
- 2) Variabel keberterimaan *stakeholders* terhadap kegiatan sosialisasi SPM SLF Bangunan Gedung yang dilakukan PUSKIM. Diukur melalui unsur-unsur pendukung proses komunikasi dengan item pertanyaan:
 - a. Penguasaan narasumber terhadap materi presentasi (komunikator) dengan item pertanyaan:
 - Narasumber menguasai materi yang diberikan.
 - b. Kesesuaian materi yang diberikan dengan kebutuhan peserta. Diukur melalui item pertanyaan:
 - Materi yang diberikan berisi informasi aktual;

- Materi yang diberikan dapat diterapkan dalam menjalankan tugas pekerjaan;
 - Materi yang diberikan dapat membe-rikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di tempat pekerjaan;
 - Materi yang diberikan memuat contoh aplikatif pemanfaatan SPM.
 - Materi yang diberikan lengkap dengan apa yang ada dalam SPM.
- c. Kesesuaian teknik penyampaian materi. Diukur melalui item pertanyaan:
- Penyampaian materi dilakukan secara interaktif.
- d. Kesesuaian alat bantu yang digunakan. Diukur melalui item pertanyaan:
- Optimalisasi penggunaan alat bantu
- e. Pemahaman peserta terhadap materi SPM SLF Bangunan Gedung yang dibere-rikan dalam sosialisasi. Diukur melalui item pertanyaan:
- Peserta dapat memahami materi yang diberikan narasumber.
 - Peserta dapat memahami penerapan materi yang diberikan dalam penye-lenggaraan bangunan gedung di daerahnya.

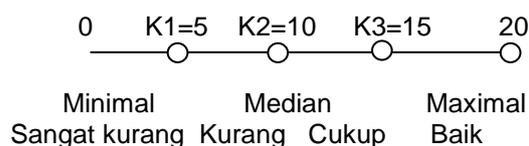
Variabel diukur menggunakan instrumen kuesioner, dengan pertanyaan atau pernyataan tertutup dan terbuka. Setiap item pertanyaan atau pernyataan tertutup terdiri dari dua alternatif jawaban, yaitu ya dan tidak. Pengukuran persepsi *stakeholders* terhadap SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui interpretasi dan pemahaman *stakeholders* terhadap penggunaan SPM dalam penerapan SLF. Melalui pengukuran persepsi ini akan didapatkan informasi peran SPM dalam penerapan SLF. Sedangkan pengukuran keberterimaan materi SPM digunakan untuk mengetahui keberterimaan materi sosialisasi oleh *stakeholders* sebagai dasar pengukuran persepsi.

4.1 Persepsi SPM dalam Penerapan SLF Bangunan Gedung.

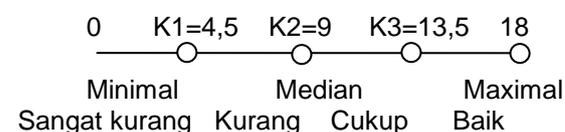
Sebelum pengukuran persepsi terlebih dahulu dilakukan pengukuran terhadap keberterimaan pengukuran aspek keberterimaan materi dalam kegiatan sosialisasi SPM Bangunan Gedung. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi, bahwa *stakeholders* yang dijadikan sebagai sampel dalam pengukuran persepsi sudah mengetahui informasi berkaitan dengan penerapan SLF seperti:

- a. SPM terkait SLF.
- b. Memahami gambaran, adanya pedoman yang memandu untuk penerapan SLF, serta mengetahui adanya teknik penilaian sistem skoring yang digunakan dalam penilaian keandalan bangunan gedung, yang merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk penerbitan SLF.

Sehingga dapat mengkondisikan atau menghomogenkan sampel, dengan demikian pengukuran persepsi dapat difokuskan untuk penerapan SLF. Aspek keberterimaan diukur melalui lima variabel yang terdiri dari 10 item pertanyaan/pernyataan. Pilihan jawaban untuk setiap item pertanyaan sama. Sehingga didapatkan nilai minimal 0, nilai tengah 10 dan nilai tertinggi 20. Bila data dikelompokkan dalam empat kuartil dapat dilihat nilai pengukuran untuk setiap kuartil pada kedua aspek (persepsi dan keberterimaan).



Aspek persepsi diukur melalui 9 item pertanyaan/pernyataan, setiap item pertanyaan/pernyataan disediakan dua alternatif pilihan jawaban ya dan tidak. Ya bila setuju dengan pernyataan/pertanyaan yang diberikan dan tidak bila tidak setuju dengan pertanyaan/pernyataan yang diberikan. Untuk setiap pilihan item pertanyaan diberi nilai 1 untuk pilihan pernyataan/pernyataan negatif dan diberi nilai dua untuk pilihan pertanyaan/ pernyataan positif, dan nilai 0 bila responden tidak memberikan pilihan. Nilai pengukuran tertinggi didapat bila responden menentukan pilihan ke arah pertanyaan/pernyataan positif (sesuai dengan tujuan yang diharapkan) 9 pertanyaan x 2 (nilai untuk setiap item pertanyaan/pernyataan) = 18. Bila untuk setiap pilihan item pertanyaan nilai 1 maka nilai ukur untuk aspek persepsi adalah 9 pertanyaan x 1 (nilai setiap item pertanyaan/pernyataan) = 9. Bila responden tidak dapat memberikan komentar untuk setiap item pertanyaan/ pernyataan, maka diberi nilai 0. Bila nilai hasil pengukuran setiap responden dikelompokkan ke dalam nilai kuartil maka rentang nilai tersebut dapat dilihat di bawah ini:



Dengan melihat hasil analisis data statistik pada tabel 1, materi yang paling dapat diterima secara berurutan sampai tingkat di bawahnya oleh responden (persentase responden dengan kriteria skoring cukup dan baik) dan tingkat persepsi responden (persentase responden dengan kriteria skoring cukup dan baik) terhadap materi tersebut secara berurutan di Provinsi Sumatera Barat: Materi yang paling dapat diterima Keselamatan Bangunan dari Segi Struktur (100%) dengan tingkat persepsi responden (kriteria cukup dan baik) paling tinggi (98,3%); kemudian gambaran pelaksanaan SLF (95%) dengan persentase tingkat persepsi responden cukup dan baik sebesar 93,3%; selanjutnya materi Pedoman Pelaksanaan SLF

(90%) dengan persentase tingkat persepsi responden (91,1%) dan teknik penilaian dengan sistem skoring (90%) dengan persentase tingkat persepsi responden (88,8%). Untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Materi yang paling dapat diterima Keselamatan Bangunan dari Segi Struktur (100%) dengan tingkat persepsi responden (kriteria cukup dan baik) paling tinggi (98%); kemudian Gambaran Pelaksanaan SLF (92,2%) dengan persentase tingkat persepsi responden cukup dan baik sebesar 93,3%; selanjutnya materi Pedoman Pelaksanaan SLF (92,2%) dengan persentase tingkat persepsi responden (90,1%) dan Teknik Penilaian dengan Sistem Skoring (88,2%) dengan persentase tingkat persepsi responden (86,2%).

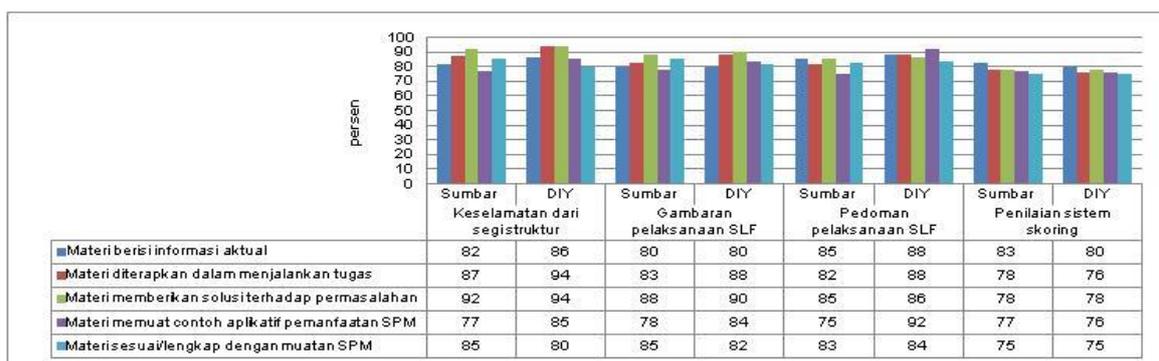
Tabel 1 Persepsi peserta terkait dengan penerapan SLF dalam penyelenggaraan bangunan gedung keberterimaan pelaksanaan sosialisasi SPM SLF Bangunan Gedung

Provinsi/Judul Materi/	Aspek yang Dinilai							
	Nilai Pengukuran Persepsi (%)				Hasil Pengukuran Keberterimaan (%)			
	0 - 4,5	4,6 - 9	9,1-13,5	13,6-18	0 - 5	5,1 - 10	10,1 - 15	15,1-20
	Kriteria							
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik
Provinsi Sumatera Barat								
Keselamatan dari Segi Struktur	0	1,7	3,4	94,9	0	0	3,4	96,6
Gambaran Pelaksanaan SLF	0	6,7	3,4	89,9	5	0	3,4	91,6
Pedoman Pelaksanaan SLF	0	11,6	3,4	85	10	0	0	90
Teknik Penilaian dengan Sistem Skoring	0	11,7	3,3	85	10	0	0	90
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta								
Keselamatan dari Segi Struktur	2,0	0	11,7	86,3	0	0	3,9	96,1
Gambaran Pelaksanaan SLF	2,0	7,8	3,9	86,3	7,8	0	0	92,2
Pedoman Pelaksanaan SLF	2,0	7,9	3,9	86,2	7,8	0	0	92,2
Teknik Penilaian dengan Sistem Skoring	2,0	11,8	7,9	78,3	11,8	0	3,9	84,3

Sumber: PUSKIM, hasil pengumpulan data 2012

Berdasarkan hasil analisis data deskriptif, keberterimaan materi yang diberikan dalam kegiatan sosialisasi SPM SLF Bangunan Gedung, baik. Keempat materi yang diberikan diperlukan oleh *stakeholders*, berisi informasi contoh aplikatif dan aktual, dengan demikian dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SLF bangunan gedung. Persentase keberterimaan materi

penilaian sistem skoring paling rendah diantara ketiga materi lainnya, karena materi ini merupakan informasi yang belum tersebarluaskan secara luas dan masih baru, dibandingkan ke tiga materi lainnya. Dengan melihat hasil di atas, secara garis besar informasi penerapan SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung sudah sampai pada *stakeholders*. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

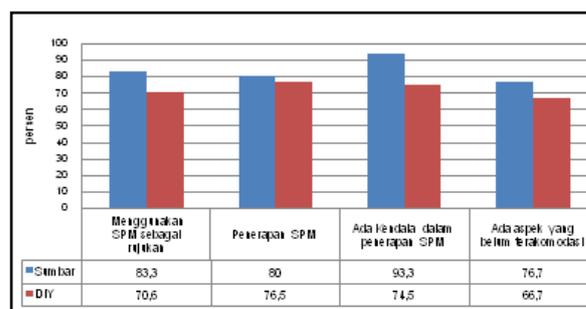


Gambar 1 Deskripsi *stakeholders* terkait keberterimaan materi SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung (satuan %)

Deskripsi hasil jawaban *stakeholders* seperti terlihat pada Tabel 1, terkait persepsi penerapan SPM dalam penerapan SLF Bangunan Gedung, secara umum *stakeholders* sudah memahami perlunya dipenuhi persyaratan keselamatan bangunan dari segi struktur, lebih detail di atur dalam beberapa SPM Bangunan Gedung. Informasi lebih detail dapat dilihat pada Gambar 2, secara umum *stakeholders* memahami, sudah tersedianya SPM yang mengatur keselamatan bangunan gedung, dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dari segi struktur (76,5% *stakeholders* di provinsi DIY dan 80% *stakeholders* provinsi Sumatera Barat). Namun dalam penerapannya masih menemukan kendala (dinyatakan oleh 93,3% *stakeholders* di provinsi Sumatera Barat dan 74,3% responden provinsi DIY) seperti:

- Ketersediaan tukang yang memahami dan mempunyai niat untuk mengikuti persyaratan yang telah ditentukan dalam SPM, terutama dalam pelaksanaan pembangunan struktur bangunan gedung, seperti: ketika mengerjakan sambungan-sambungan rangka struktur bangunan gedung, penempatan kolom dan balok dinding. Pada kenyataan di lapangan merubah budaya tukang untuk bekerja sesuai dengan persyaratan yang sudah ada dalam SPM tidak mudah, perlu adanya sistem pengawasan yang mengkondisikan mereka untuk dapat berubah.
- Keterbatasan tenaga ahli di jajaran pemerintah daerah yang memahami SPM SLF bangunan gedung.
- Ketersediaan standar belum dapat menimbangi pesatnya pengembangan teknologi di bidang penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga penggunaan beberapa teknologi di lapangan belum terakomodir dalam SPM.
- Perlu adanya integrasi dari beberapa instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan

penerapan SPM dalam penerapan SLF seperti: BPN sebagai instansi yang menerbitkan IMB dan Dinas PU sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SLF.

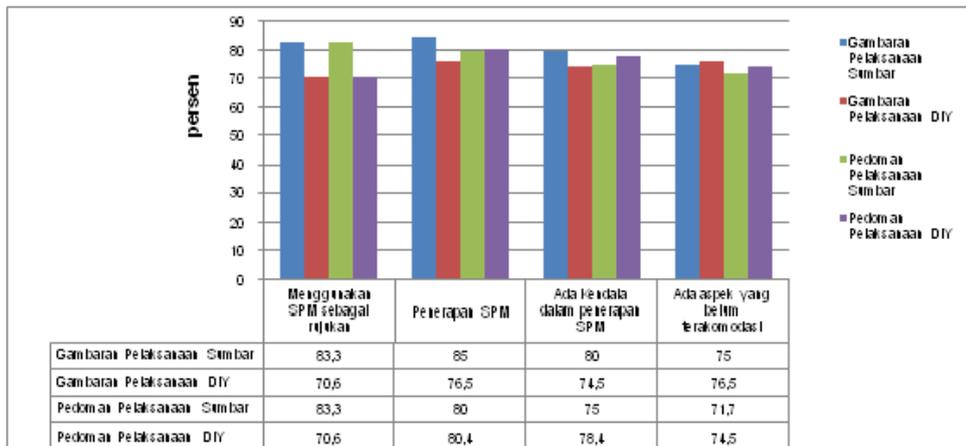


Gambar 2 Deskripsi *stakeholders* terkait implementasi SPM keselamatan bangunan dari segi struktur untuk provinsi DIY dan Sumbar (satuan %).

Persepsi *stakeholders* untuk dua materi lainnya Gambaran Pelaksanaan SLF dan materi pedoman pelaksanaan SLF, baik, lebih rinci dapat dilihat pada gambar 3. Secara umum *stakeholders* sudah memahami gambaran penerapan SPM dalam pelaksanaan SLF, siapa yang menerbitkan SLF, dan siapa yang harus memiliki SLF, dan peran SPM dalam penerapan SLF. Demikian juga dengan pedoman yang harus dijadikan sebagai acuan dalam penerapan SLF, sudah diatur dalam Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, seperti kapan di terbitkannya, dan klasifikasi gedung seperti apa yang harus memiliki SLF, serta SPM yang digunakan sebagai acuan. Regulasi SLF masih dinyatakan sulit untuk diterapkan, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

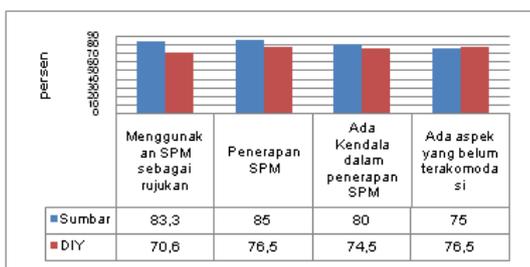
- Untuk di terapkan karena PERDA terkait hal tersebut belum tersedia.
- Penerapan SLF (ketika pelaksanaan pengujian keandalan bangunan) untuk bangunan yang sudah berdiri dan dihuni

- selain membutuhkan dana yang tidak sedikit juga cukup menganggu.
- c. Perlu disiapkan ketersediaan tenaga ahli dari aparat pemerintah daerah, untuk dapat menjalankan wewenangnya dalam menerbitkan SLF, serta tersedianya laboratorium uji yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melaksanakan pengujian keandalan bangunan gedung.
 - d. Belum adanya pedoman pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung.



Gambar 3 Deskripsi *stakeholders* terkait implementasi gambaran dan pedoman penerapan SLF (dalam satuan %)

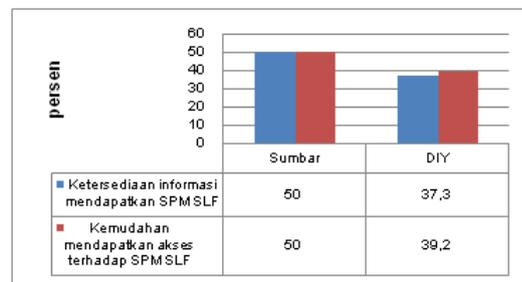
Persepsi *stakeholders* terkait teknik penilaian dengan sistem skoring, baik, dapat dijelaskan dari hasil pengolahan data secara deskriptif pada gambar 4. Teknik penilaian ini dapat diterapkan dan akan sangat membantu dalam penilaian keandalan bangunan gedung, namun perlu lebih di standarkan lagi klasifikasi/acuan untuk standarisasi penentuan skor pada setiap aspek (kesehatan, kenyamanan dan kemudahan). Ketepatan pemberian skoring sangat tergantung pada keterampilan penilai, untuk itu spesifikasi penentuan nilai skoring perlu di standarkan, untuk membantu keseragaman dalam penilaian.



Gambar 4. Deskripsi *stakeholders* terkait implementasi penilaian dengan sistem skoring provinsi DIY dan Sumbar (dalam satuan %).

Ketersediaan SPM sebagai acuan untuk penilaian keandalan bangunan gedung merupakan suatu faktor yang cukup penting, menjadi suatu hambatan dalam penerapan SLF, hal tersebut dinyatakan oleh hampir sebagian besar *stakeholders*, lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5. Informasi untuk mendapatkan

SPM SLF bangunan gedung dan akses untuk mendapatkan SPM SLF bangunan gedung masih dirasa masih menghadapi kesulitan.



Gambar 5. Deskripsi *stakeholders* terkait implementasi penilaian dengan sistem skoring provinsi DIY dan Sumbar (dalam satuan %).

5. KESIMPULAN

Persepsi *stakeholders* terhadap SPM dalam penerapan SLF bangunan gedung sudah baik. Secara garis besar *stakeholders* dapat memahami dengan baik: Pentingnya dipenuhi persyaratan teknik bangunan gedung melalui empat aspek (keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan); Pentingnya dipenuhi persyaratan struktur untuk keselamatan bangunan gedung; dapat memberikan gambaran dimana dan kapan perlu dilakukan SLF bangunan gedung, dan apa yang dijadikan acuan untuk pelaksanaannya, dengan demikian dapat mengkaitkan kondisi bangunan gedung dengan pelaksanaan SLF Bangunan Gedung.

Stakeholders secara umum memahami dengan adanya undang-undang bangunan gedung nomor 28 tahun 2002, dan lebih di detailkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002, serta Permen PU nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, *stakeholders* memahami bahwa regulasi SLF bangunan gedung harus diterapkan. Dalam penerapan SLF bangunan gedung, ketersediaan SPM diperlukan, untuk dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Tapi masih banyak kekhawatiran dari *stakeholders* untuk menerapkan SPM dalam penerapan SLF, karena adanya beberapa kendala diantaranya: Ketersediaan tenaga ahli, belum tersedianya pedoman pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung, ketersediaan laboratorium uji kelayakan bangunan, ketersediaan tukang yang profesional, masih adanya beberapa komponen yang belum terakomodir dalam SPM, dan masih banyaknya bangunan gedung yang sudah berdiri belum mempunyai IMB.

SNI 03-2847-1992 Tata Cara Perencanaan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung;
SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung;
SNI 03-1726-2002 Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung
Soekamto, S. (1986). "*Sosiologi Suatu Pengantar*". Jakarta, Rajawali;
Sugiyono. 1999. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: Alfabet;
Undang-undang Nomor 28 tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
Vincent Gaspersz. (1986). "*Statistika Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial*". Bandung: Armico;

DAFTAR PUSTAKA

- Kristanto, R. (2006). Tesis. "Kajian Persepsi dan Partisipasi *Masyarakat dalam Pemadaman Kebakaran*". Bogor, Institut Pertanian Bogor;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002;
- Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRA/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi;
- Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU (2011). "Modul Diseminasi SPM Keandalan Bangunan Gedung yang Laik Fungsi";
- Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU (2011). "Pedoman Penilaian Keandalan Bangunan Gedung";
- Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU (2012). "*Laporan Diseminasi dan Sosialisasi SPM Provinsi Sumatera Barat*";
- Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU (2012). "*Laporan Diseminasi dan Sosialisasi SPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*";
- Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian PU (2012). "*Laporan Advis Teknik A 2012*";
- SKBI 1.3.53.1987 Pedoman Perencanaan pembebanan untuk Rumah dan Gedung;